KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: Biaya Investasi Tinggi: Pertumbuhan Ekonomi Kita Stagnan
Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Pertumbuhan Ekonomi Kita Stagnan

DPR: Biaya Investasi Tinggi

Senayan mengapresiasi kinerja investasi yang ditorehkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sepanjang tahun 2021 hingga 2023 ini. Jumlah investasi yang masuk ke Indonesia sangat besar, sebarannya juga besar.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, kinerja investasi mestinya mampu berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu penyebabnya, biaya investasi yang terbilang tinggi.

Kondisi ini pula yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian nasional tetap stagnan di angka 5 persen. Penyebabnya, lantaran lembaga ekonomi kita boros, sangat tidak efisien sehingga menjadi parasit dalam sistem perekonomian negara.

"Daron Acemoglu (pakar ekonomi internasional) mengatakan parasitik. Itu penyebab biaya investasi masih tinggi," terang peraih gelar Asscociate Profesor dari Universitas Borobudur ini.

Darmadi bilang, andaikata biaya investasi ini bisa diturunkan, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan melesat naik ke 6 persen. Indikator tingginya biaya investasi ini bisa dilihat dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi, yakni sebesar 7,6 pada tahun 2022.

Menurutnya, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Kamboja, Filipina, dan Vietnam yang rata-rata berada di kisaran 4 dan 5.

"Andaikata ini (ICOR) bisa kita samakan dengan negara-negara ASEAN, maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Nah apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan ICOR. Kalau bisa ke 5 saja, luar biasa," terangnya.

Darmadi juga mengapresiasi peningkatan kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Jika beberapa bulan lalu, pelaku yang memiliki NIB sebanyak dua jutaan, kini jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai 5,53 juta. "Ini capaian luar biasa dari 2 juta ke 5 juta," katanya.

Hanya saja, dia menyayangkan, anggaran untuk OSS ini tidak mendapat persetujuan untuk penambahan. Padahal, jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB tersebut baru mencapai 3 persen dari total pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 65 juta lebih.

"Jadi masih ada sekitar 60 juta. Ini masih jauh," terangnya.

Karena itu, dia tidak heran masih sangat banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki NIB. Kementerian Investasi mesti lebih gencar lagi melakukan sosialisasi sehingga jumlah pelaku UMKM terdaftar di OSS meningkat.

"Kita berharap ada strategi lebih cepat sehingga di akhir 2024, pas Oktober nanti, ini (NIB) bisa mencapai kurang lebih 15 juta. Itu harapan kita supaya lebih bagus, lebih cepat pergerakannya," jelas Bendahara Megawati Institue ini.

Dia mengatakan, peningkatan investasi tidak selalu berkaitan dengan pertambahan lapangan kerja. Sebab, berbagai data yang ada justru menunjukkan, kenaikan investasi Rp 900 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 1.200 triliun pada tahun 2022, tidak signifikan dengan penambahan lapangan kerja. Padahal investasi yang masuk sangat besar.

Diakuinya, sumbangsih investasi yang naik ini telah mendorong tejadinya peningkatan pertumbuhan penjualan. Tapi sayangnya, pertumbuhan ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen.

"Ada jebakan di sana padahal kita ingin menuju Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas. Ini bahaya sekali," tegasnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui NIB ini memang sesuatu yang baru bagi pelaku usaha. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Data pelaku UMKM yang teregistrasi saat ini tidak lebih dari 50 persen.

"Nilainya belum (ada). Jadi masih ada kurang lebih 30 sampai 50 juta lebih," terangnya.

Karena itu, dia memastikan telah memerintahkan para deputinya untuk menggencarkan sosialisasi NIB, terutama di wilayah DKI Jakarta.

"Supaya kita memberikan pencerahan dan masukan kepada UMKM. Karena saya lihat Pak Darmadi ini, sangat konsen betul terhadap rakyat kecil," sebutnya.

Bahlil juga mengakui ICOR di dalam negeri juga masih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand. Karena itu, dia tidak menampik jika *cost economy* di dalam negeri cukup tinggi. Namun demikian, tingginya cost economy ini bukan lantaran biaya logistik kita mahal. Namun dia memastikan, satgas investasi sudah bekerja untuk menekan masalah ini.

Sementara menyangkut OSS, dia memastikan, sistem tersebut sudah jalan. Cuma memang tidak terlalu cepat. Salah satu penyebabnya, belum koneksinya Rencana Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKPPR) dengan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG).

"Masih setengah proses itu di kementerian teknis. Bagian itulah yang menyebabkan mungkin ada hal-hal sehingga ICOR naik. Saya tidak bisa menduga-duga seratus persen. Tapi ini PR kami untuk bisa turunkan bersama-sama," pungkasnya. ■ KAL